



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)**

Oleh :


NENNY FITRIA
05 953 054

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2009**



	No Alumni Universitas	NENNY FITRIA	No Alumni Fakultas
BIODATA			
<p>a). Tempat/Tgl Lahir: Bukittinggi, 1 September 1986 b). Nama Orang Tua: Drs. Damsir Dulin, B.Sc dan Fitriani c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No.Bp: 05953054 f). Tanggal Lulus: 31 Oktober 2009 g). Prediket lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,13 i). Lama Studi: 4 Tahun 2 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Syech Ibrahim Musa. No.44. Bukittinggi – Sumatera Barat</p>			

**EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Study Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)**

Skripsi S-1 Oleh: Nenny Fitria

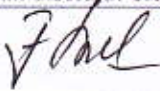
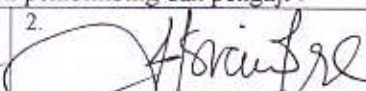
Pembimbing: Drs. A. Rizal Putra, Msi, Akt

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan apakah perkembangan kinerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meningkat sebelum dan sesudah implementasi *Good Corporate Governance*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari Laporan GCG perusahaan dan aktivitas GCG yang telah dilakukan serta kinerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Data diuji dengan membandingkan antara praktik GCG di PT BNI dengan teori GCG yang diperoleh dari buku teks dan ketentuan-ketentuan penerapan GCG yang diberlakukan di lingkungan perbankan nasional, kemudian menggunakan implikasi penerapan GCG terhadap kinerja sebagai dasar perbandingan antara kinerja sebelum dan sesudah penerapan GCG.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip-Prinsip GCG menjadi landasan pelaksanaan operasional BNI. Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dengan adanya keterbukaan dalam hal laporan keuangan dan non keuangan. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas dengan adanya pengungkapan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban organ perusahaan dengan jelas. Pelaksanaan Prinsip Responsibilitas dengan adanya kepatuhan BNI terhadap peraturan yang berlaku dan adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan Prinsip Independensi yaitu tidak adanya benturan kepentingan dan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa memihak. Pelaksanaan Prinsip Kewajaran yang berdasarkan asas kesetaraan yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh stakeholders. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Oktober 2009, telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3.
Nama Terang	Drs. Fauzi Saad, Ak	Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si	Drs. A. Rizal Putra, Msi, Akt

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. H. Yuskar, SE, MA, Akt
NIP. 131 629 305

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 merupakan mimpi buruk bagi sejarah perekonomian Indonesia, terutama pada sektor perbankan. Krisis tersebut berdampak sangat besar bagi sendi-sendi perekonomian yang nyaris melumpuhkan perekonomian nasional.

Persoalan utama yang dihadapi oleh sektor perbankan pada masa itu adalah semakin banyaknya bank terlikuidasi yang dinilai pemerintah sebagai bank yang bermasalah atau tidak sehat. Tindakan likuidasi dilakukan, agar tidak berpengaruh dan merupakan satu-satunya alternatif terakhir yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perbankan Indonesia.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada sektor perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan BI No.8/4/2006 dalam Tunggal, 2006:103).

Dengan adanya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memperbaiki citra dan kelangsungan hidup perbankan yang sempat terpuruk pada masa itu.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi demikian penting, artinya semakin dekat suatu perusahaan menjalankan *Good Corporate Governance* maka akan dekat yang bersangkutan dengan akses dana. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus didukung oleh unsur-unsur intern perusahaan, diantaranya Pemegang Saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Manajer, Komite Audit, Satuan Pengawas Intern atau auditor intern, Karyawan atau Serikat Kerja (Tunggal, 2002:25).

Salah satu dari temuan praktik yang tidak sehat pada perbankan Indonesia, yang mencerminkan adanya permasalahan *Good Corporate Governance*. Praktik kejahatan perbankan seperti, kasus pembobolan Bank BNI yang mengejutkan masyarakat Indonesia akhir tahun 2003, Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat *Letter of Credit (L/C)*. Kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas pada keuangan negara secara makro, disusul dengan pembobolan Bank BRI Rp 294 miliar yang merupakan kasus pelanggaran prosedur terkait dengan pemberian pinjaman dengan jaminan deposito dan pencairan dana (Majalah Trust, 16 Mei 2007). Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran pelaku bisnis perbankan akan pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas,

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi landasan bagi pelaksanaan operasional BNI, dan sejalan dengan itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasannya, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BNI.
2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan prinsip *transparency* dengan benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterbukaan dalam hal laporan keuangan dan non keuangan.
3. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan benar dan telah memenuhi kaedah yang ditetapkan berdasarkan teori dan peraturan terkait, pada prinsip ini BNI telah mengungkapkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban setiap organ perusahaan dengan jelas.
4. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan prinsip *responsibilitas* sesuai dengan kaedah, hal ini terbukti dengan kepatuhan BNI terhadap peraturan yang berlaku, dan adanya pelaksanaan tanggung

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2005. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri)", Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Buku Pedoman "Good Corporate Governance PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Corporate Governance dan Etika Korporasi", Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, 1999.
- Daniri Mas Ahmad. 2005. "*Good Corporate Governance :Konsep dan Penerapannya di Indonesia*". Jakarta: Ray Indonesia.
- Hastuti, Dwi Theresia. 2005. "Hubungan antara *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di BEJ)", SNA VIII. Solo.
- Kaihatu, S. Thomas. 2006. *Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Manajemen, volume 8, Nomor 1, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Monks, Robert A.G, dan Minow, N. 2000. *Corporate Governance 3th Edition*, Blackwell Publishing.
- Wardhani, Ratna. 2006. *Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)*, SNA IX. Padang.
- World Bank. 2005. *Corporate Governance Country Assessment: Republic of Indonesia*, Jakarta.
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- <http://www.google.com>. *Menata Bank dengan Good Corporate Governance*.2004.
- <http://www.google.com>. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*.2007.
- <http://www.petra.co.id>. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*.2007.